

**PEMERINTAH
KABUPATEN BONE**



**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA-PD)
PERUBAHAN
DINAS NBPERHUBUNGAN
TAHUN
2021**



2021



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone diharapkan mampu menghadapi perubahan dasar yang akan terjadi di Kabupaten Bone dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Watampone, Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**

Drs. ANDI DARMAWAN A.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19640830 199205 1 001



HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	25
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V. PENUTUP	36



1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone bidang Perhubungan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone merupakan salah satu Dinas Teknis Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 dan bertanggung jawab kepada bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pelayanan di bidang Perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023;
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
23. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2021 ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2021;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2021;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang perlunya Renja PD, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja PD.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah; analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan; isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Perhubungan; review terhadap rancangan awal RKPD; penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang mengemukakan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; tujuan dan sasaran renja perangkat daerah; program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, pada bab ini dipaparkan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

BAB V Penutup, menjelaskan kesimpulan dari rencana kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2021.



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2020 terdapat tujuh belas (17) kegiatan yang menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dinas :

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.

Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2019 kegiatan ini terdapat anggaran yang terdiri dari anggaran belanja telepon dan belanja listrik yang dialokasikan dana sebesar Rp. 14.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.103.257,- atau dengan kata lain dana terserap sebesar 85,23% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.096.743,-. Adapun untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 19.720.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.260.380,- (keadaan bulan April) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 31,74% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 13.459.620,-.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib administrasi dan kesejahteraan aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Pada tahun 2019 kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 535.800.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 524.650.000,- atau dengan kata lain dana terserap sebesar 97,92% dengan sisa anggaran Rp. 11.150.000,-. Dan untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 563.490.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 177.630.000,-

(keadaan bulan April) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 31,52% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 385.860.000,-.

3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran maka, pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% atau kegiatan fisik terlaksana 100%. Adapun untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 4.650.000,- (keadaan bulan April) atau 46,5% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.350.000,-.

4. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah & Luar Daerah

Dalam rangka memperlancar koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas yang akan dan telah dilaksanakan, baik dalam maupun luar daerah. Maka, pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 314.300.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 314.103.600,- atau 99,94% atau kegiatan fisik terlaksana 100% dengan sisa anggaran Rp. 196.400,-. Adapun untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 364.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 254.321.429,- (keadaan bulan April) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 69,86% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 109.678.571,-.

5. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 134.826.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 134.799.900,- atau 99,98% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 26.100,-. Dan tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 601.591.592,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 231.429.392,- (keadaan bulan April) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 38,46% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 370.162.200,-.

6. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan capaian kegiatan yaitu tersedianya kendaraan bermotor roda dua sebanyak 2 unit. Pada tahun 2020 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 215.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 177.038.000,- (keadaan bulan April) atau 82,34% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.962.000,-.

7. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran peralatan gedung kantor yang layak pakai. Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 110.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- atau 100%. Dan tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 208.265.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 208.265.000,- (keadaan bulan April) atau dengan kata lain dana terserap sebesar 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran gedung kantor yang layak pakai. Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 19.998.431,- atau 99,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.569,-. Adapun untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 7.546.500,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.546.500,- (keadaan bulan April) atau 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%.

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran kendaraan dinas yang layak pakai. Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 119.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 118.943.355,- atau 99,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 56.645. Dan untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 175.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 84.214.194,- (keadaan bulan April) atau 48,12% dengan sisa anggaran Rp. 90.785.806,-.

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran peralatan elektronik yang layak pakai. Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 7.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%. Adapun tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 5.092.908,- dengan

pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- (keadaan bulan April) dan belum terealisasi.

11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terwujudnya pelatihan dan bimbingan teknis guna tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas di bidangnya masing-masing. Pada tahun 2019 dialokasikan dana sebesar Rp. 42.125.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 20.000.000,- atau 47,47% dengan sisa anggaran Rp. 22.125.000,-.

12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran tersedianya pakaian dinas harian. Pada tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 47.750.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 47.750.000,- (keadaan bulan April) atau 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100%.

13. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 33.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 32.997.000,- atau 99,99% dengan sisa anggaran Rp. 3.000,-. Adapun untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 36.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (keadaan bulan April) atau 33,33% dengan sisa anggaran Rp. 24.000.000,-.

14. Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya penyusunan rencana perangkat daerah sebanyak 5 dokumen. Pada tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 48.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 16.000.000,- (keadaan bulan April) atau 33,33% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 32.000.000,-.

15. Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya pengelolaan website dalam menunjang peningkatan pemerintahan umum. Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 41.200.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 41.200.000,- atau 100%. Dan pada tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 41.200.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 30.400.000,- (keadaan bulan April) atau 73,78% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.800.000,-.

16. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2019 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 59.920.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 59.515.000,- atau 100%. Adapun untuk tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 131.205.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 123.249.500,- (keadaan bulan April) atau 93,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.955.500,-.

17. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan traffic light di wilayah Kabupaten Bone, maka pada tahun 2019 dialokasikan dana sebesar Rp. 45.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100%. Dan untuk tahun 2020 perlu dialokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- (keadaan bulan April) dan belum terealisasi.

18. Kegiatan Pengadaan APILL

Dalam rangka peningkatan dan pengamanan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada tahun 2020 kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar sebesar Rp. 0,- (keadaan bulan April) dan belum terealisasi.

Secara keseluruhan belanja langsung dari anggaran yang telah ditetapkan di DPPA-PD adalah Rp. 2.563.861.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan April 2020 sebesar Rp. 1.380.754.395,- atau 53,85%, sisa dana sebesar Rp. 1.183.106.605,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Belanja Pegawai | : Rp. 870.496.411,- terealisasi |
| Dana sebesar sesuai DPPA | : Rp. 4.086.681.268,- |
| Selisih sebesar | : Rp. 3.216.184.857,- |
| b. Belanja Langsung | : Rp. 1.380.754.395,- terealisasi |
| Dana sebesar | : Rp. 2.563.861.000,- |
| Sisa anggaran sebesar | : Rp. 1.183.106.605,- |

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kab. Bone

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (keadaan bulan April)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan website	120	5,44%	Rp 6.260.380	Rp 75.000.000	Rp 12.103.257	16%	Rp 75.000.000	Rp 93.363.637	81%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali)	540	6,63%	Rp 177.630.000	Rp 250.000.000	Rp 524.650.000	210%	Rp 250.000.000	Rp 952.280.000	36%	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang menyediakan bahan bacaan (kali)	196	4,65%	Rp 4.650.000	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	67%	Rp 15.000.000	Rp 29.650.000	30%	
	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi / konsultasi yang diikuti (kali)	150	14,65%	Rp 254.321.429	Rp 462.000.000	Rp 314.103.600	68%	Rp 462.000.000	Rp 1.030.425.029	59%	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor, jasa foto copy dan biaya makan dan minum (paket)	180	28,11%	Rp 231.429.392	Rp 200.000.000	Rp 134.799.900	67%	Rp 200.000.000	Rp 566.229.292	69%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			225,49%	Rp 477.063.694	Rp 375.122.250	Rp 287.440.786		Rp 375.122.250	Rp 962.588.730		
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun (unit)	1	0,00%	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	0%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia (unit)	16	10,29%	Rp 177.038.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp 177.038.000	10%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Knerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (keadaan bulan April)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			3	4	5	6	7	8-(7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
												8-(7/6)	
1	2	3	4		5		6			9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pergadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor (paket)	8	Rp 35.000.000	0,00%	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	Rp -	0%	
	Pergadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (paket)	10	Rp 97.581.600	213,20%	Rp 208.265.000	Rp 100.000.000	110%	Rp 110.000.000	Rp 100.000.000	Rp 418.265.000	428%	
	Pergadaan Mebleur	Jumlah pengadaan mebleur (paket)	10	Rp 192.310.650	0,00%	Rp -	Rp 50.000.000	63%	Rp 31.500.000	Rp 50.000.000	Rp 31.500.000	42%	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (kegiatan)	5	Rp 183.155.000	4,12%	Rp 7.546.500	Rp 30.000.000	67%	Rp 19.998.431	Rp 30.000.000	Rp 57.544.931	31%	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (paket)	204	Rp 1.030.000.000	8,17%	Rp 84.214.194	Rp 180.122.250	66%	Rp 118.942.355	Rp 180.122.250	Rp 383.278.799	37%	
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (kegiatan)	60	Rp 42.735.700	0,00%	Rp -	Rp 15.000.000	47%	Rp 7.000.000	Rp 15.000.000	Rp 22.000.000	51%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 100.000.000		Rp 47.750.000	Rp -		Rp -	-			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN/Non ASN yang mendapat pakaian dinas (pasang)	200	Rp 50.000.000	95,50%	Rp 47.750.000	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	Rp 47.750.000	96%	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah ASN/Non ASN yang mendapat pakaian olahraga (pasang)	200	Rp 50.000.000	0,00%	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	Rp -	0%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rp 257.177.587		Rp -	Rp 49.809.375		Rp 20.000.000	49.809.375	69.809.375		
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal (orang)	5	Rp 166.177.587	0,00%	Rp -	Rp 49.809.375	40%	Rp 20.000.000	Rp 49.809.375	Rp 59.809.375	42%	
	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis / ron formal (orang)	23	Rp 91.000.000	0,00%	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -	Rp -	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (keadaan bulan April)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	3	5	6	7	8-(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 201.468.300	Rp 12.000.000	Rp 18.191.250	Rp 32.997.000		Rp 18.191.250	Rp 63.188.250			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja Dinas Perhubungan yang tersusun (dokumen)	30	Rp 201.468.300	Rp 18.191.250	Rp 32.997.000	181%	Rp 18.191.250	Rp 63.188.250		31%	
	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Rp 404.157.620	Rp 30.400.000	Rp -	Rp 41.200.000		-	87.600.000			
	Penyusunan Rencanan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan rencana perangkat daerah (dokumen)	27	Rp 152.627.500	Rp 16.000.000	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp 16.000.000		10%	
	Pengelolaan website perangkat daerah	Jumlah pemeliharaan website selama setahun (kegiatan)	5	Rp 251.530.120	Rp 30.400.000	Rp 41.200.000	#DIV/0!	Rp -	Rp 71.600.000		28%	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Rp 1.125.765.000	Rp -	Rp -	Rp 24.890.000		Rp -	Rp 24.890.000			
	Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dokumen kendaraan angkutan transportasi (kali)	5	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -		0%	
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah masyarakat dan pengendara yang terayani (kegiatan)	5	Rp 915.765.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -		0%	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Aksebilitas masyarakat yang terselenggara khususnya di kecamatan Mare (kegiatan)	5	Rp 160.000.000	Rp -	Rp 24.890.000	#DIV/0!	Rp -	Rp 24.890.000		15%	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Rp 883.817.592	Rp 123.249.500	Rp 134.661.450	Rp 104.919.500		Rp 134.661.450	Rp 362.830.450			
	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara (kegiatan)	5	Rp 368.817.592	Rp 67.740.750	Rp 59.919.500	88%	Rp 67.740.750	Rp 250.909.750		68%	
	Rehabilitasi/ pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Jumlah terminal / peabuhan yang terpelihara (palet)	2	Rp 350.000.000	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	Rp -		0%	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light	Jumlah Traffic Light yang terpelihara (titik)	190	Rp 165.000.000	Rp -	Rp 45.000.000	67%	Rp 66.920.700	Rp 111.920.700		68%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (keadaan bulan April)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			2	3	4	5	6	7	8-(7/6) #DIV/0!		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6) #DIV/0!	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Pengadaan Warning Light	Jumlah Pengadaan Warning Light untuk Meminimalisir jumlah potensi laka lintas tersedia (Buah)	2	Rp	30.000.000	-	Rp	-	-	Rp	-	0%
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				Rp	60.000.000	Rp	968.000.000		Rp	1.105.000.000	
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang tersedia (unit)	350	Rp	1.372.099.000	-	Rp	17.000.000	9%	Rp	198.500.000	14%
	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan yang tersedia (paket)	5	Rp	366.306.000	16,37%	Rp	60.000.000	8%	Rp	906.500.000	247%
	Pengadaan Guard Rail	Jumlah Pengadaan Guard Rail untuk keselamatan lalu lintas (Meter)	700	Rp	1.010.000.000	-	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	0%
	Pengadaan APILL	Jumlah Apil Pengendali arus lalu lintas (Unit)	3	Rp	1.200.000.000	-	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	0%
	Pengadaan Cermin Tikungan	Jumlah Cermin Tikungan Tersedia (Unit)	5	Rp	33.500.000	-	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	0%
	Pengadaan Road Barrier	Jumlah Road Barrier Untuk rekayasa jalan (Meter)	200	Rp	216.000.000	-	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	0%
	Pengadaan Deliniator	Jumlah Deliniator untuk Meminimalisir potensi laka lintas di daerah rawan kecelakaan (Buah)	20	Rp	200.000.000	-	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	0%
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				Rp	40.424.000	Rp	130.814.500		Rp	171.238.500	
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor (bulan)	60	Rp	815.641.360	4,95%	Rp	130.814.500	#DIV/0!	Rp	171.238.500	21%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												
							Rp	2.647.784.325		Rp	5.771.120.263	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

SASARAN	INDIKATOR	2019		% CAPAIAN TARGET
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	B	CC	50
Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan aksesibilitas jalan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:75	1:75	100
	Rasio Ijin Trayek	0,0010	0,0006	60
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif	Pemasangan Rambu-rambu	150	16	10,66
	Persentase Pelayanan Angkutan	60	50	83,33
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.810	3.230	178,45
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	60	60	100

b. Capaian Kinerja Program

No.	Sasaran / Program / Kegiatan	Tahun 2019 (Rp.)		% Fisik
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
Sasaran 1 :				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan.				
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.009.126.000	995.656.757	98,67% 100%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.200.000	12.103.257	85,23% 100%
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	535.800.000	524.650.000	97,92% 100%
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangan	10.000.000	10.000.000	100% 100%
4.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	314.300.000	314.103.600	99,94% 100%
5.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	134.826.000	134.799.900	99,98% 100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	287.500.000	287.440.786	99,98% 100%
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	110.000.000	110.000.000	100% 100%
2.	Pengadaan Mebeleur	31.500.000	31.500.000	100% 100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.998.431	99,99% 100%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	119.000.000	118.942.355	99,95% 100%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	100% 100%
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.125.000	20.000.000	47,48% 47,48%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	42.125..000	20.000.000	47,48% 47,48%

No.	Sasaran / Program / Kegiatan	Tahun 2019 (Rp.)		% Fisik
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.000.000	32.997.000	100% 100%
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.000.000	32.997.000	99,99% 100%
V.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	41.200.000	41.200.000	100% 100%
1.	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	41.200.000	41.200.000	100% 100%
Sasaran 2 : <i>Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur dasar dan aksebilitas jalan.</i>				
VI.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	25.000.000	24.890.000	99,56% 100%
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000	24.890.000	99,56% 100%
Sasaran 3 : <i>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif.</i>				
VII.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	104.920.000	104.920.000	100% 100%
1.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	59.920.000	59.920.000	100% 100%
2.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	45.000.000	45.000.000	100% 100%

No.	Sasaran / Program / Kegiatan	Tahun 2019 (Rp.)		% Fisik
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
VIII.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	304.029.000	152.027.500	100% 100%
1.	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	51.029.000	51.029.000	100% 100%
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	200.000.000	48.159.000	24,08% 24,08%
3.	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	53.000.000	52.839.500	99,70% 100%
IX.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	77.000.000	77.000.000	100% 100%
1.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	17.000.000	17.000.000	100% 100%
2.	Pengadaan Marka Jalan	60.000.000	60.000.000	100% 100%
X.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	133.600.000	130.814.500	99,78% 100%
1.	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	133.600.000	130.814.500	99,78% 100%
JUMLAH		2.057.500.000	1.866.946.543	90,59% 100%

c. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Target 2019(Rp)	Realisasi 2019	
			Rp	%
1.	Kinerja Anggaran	2.057.500.000	1.866.946.543	90,59
2.	Kinerja Pendapatan Perangkat Daerah	883.234.000	891.235.000	100,90

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020(Keadaa	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase layanan angkutan umum			60%	70	80%	50%	-	80%	90%	
2.	Rasio ijin trayek			0,0010%	0,00%	0,0020%	0,0006%		0,0020%	0,0025%	
3.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan			1:75	1:80	1:80	1:75		1:80	1:90	
4.	Pemasangan rambu-rambu			150 Unit	50 Unit	50 Unit	16 Unit		50 Unit	50	
5.	Jumlah uji kir angkutan umum			1.810 Buah	1.991 Buah	2.190 Buah	3.230 Buah	-	2.190 Buah	2.409	
6.	Persentase kepemilikan kir angkutan umum			60%	70%	80%	60%	1.800 Meter Lari	80%	90	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kab. Bone memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan transportasi;
2. Adanya Sumber Daya Manusia yang potensial;
3. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik;
4. Sarana dan prasarana operasional pelayanan yang dimiliki;
5. Jaringan trayek yang memadai.

b. Kelemahan

1. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin. Kurangnya pegawai yang pernah mengikuti diklat PPNS, pengujian kendaraan dan manajemen lalulintas perkotaan.
2. Pendistribusian tugas tidak merata
3. Tidak memahami tupoksi
4. Kurang lengkapnya Data Base data yang akurat, informatif dan actual
5. Kurangnya perlengkapan jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kab. Bone memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Peluang

1. Adanya perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah di bidang LLAJ;
2. Rencana pembangunan bandara dan pengembangan wilayah pasca operasional bandara;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi;
4. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan outcome kerja instansi pemerintah;
5. Jaringan trayek yang memadai.

b. Tantangan

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas;
2. Presentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada;
3. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan munculnya angkutan online;
4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya;

5. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum.

Berdasarkan analisis terhadap perubahan lingkungan internal dan perubahan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas di atas. Maka, dirumuskan beberapa isu-isu penting sebagai berikut :

Eksternal:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya kinerja jaringan jalan;
3. Belum optimalnya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat;
4. Belum optimalnya *Modal Share* karena belum optimalnya angkutan umum massal dan angkutan umum;
5. Masih rendahnya tingkat rata-rata kecepatan lalu lintas karena masih banyaknya titik/simpul kemacetan;
6. Tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi;

Internal:

1. Nilai evaluasi kinerja yang belum memadai;
2. Anggaran dan sarpras yang belum memadai.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik dalam rangka menunjang program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kab. Bone agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap organisasi perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan sebagai berikut :

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS :

1. - Pengadaan Guard Rill (pengaman jalan) diusulkan oleh Desa Siame (Guard Rail Lanjutan) dan Desa Ureng Kecamatan Palakka, dan Kelurahan Kahu Kecamatan Bonto Cani;
- Pengadaan Marka Jalan diusulkan oleh Desa Pusunge Kecamatan Cenrana; Jl. MH. Thamrin Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang; Jl. Lapatau Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat; Jl. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat; Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Watampone; Jl. MT Haryono Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Baarat
- Pengadaan Cermin Tikungan oleh Desa Mappesangka Kecamatan Ponre dan Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge; dan
- Pengadaan Rambu Lalu Lintas oleh Desa Lampoko dan Desa Corawali Kecamatan Barebbo, Desa Maduri Kecamatan Palakka, Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana, Desa Tocinnong Kecamatan Amali dan Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kab. Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					
	- Pengadaan Guard Rail	Desa Siame Kecamatan Palakka	- Guard Rail	250 Meter (Lanjutan)		
		Desa Ureng Kecamatan Palakka		30 Meter		
		Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani		500 Meter		
	- Pengadaan Marka Jalan	Desa Pusunge Kecamatan Cenrana	- Marka Jalan	5 Paket		
		Jl. MH. Thamrin Kelurahan Watampone	- Marka Jalan	1 Paket		
		Kecamatan Tanete Riattang				
		Jl. Lapatau Kelurahan Macege	- Marka Jalan	1 Paket		
		Kecamatan Tanete Riattang Barat				
		Jl. A. Yani Kelurahan Macanang	- Marka Jalan	1 Paket		
		Kecamatan Tanete Riattang Barat				
		Jl. Jend. Sudirman Kel. Watampone	- Marka Jalan	1 Paket		
		Kecamatan Tanete Riattang				
		Jl. MT. Haryono Kel. Macanang	- Marka Jalan	1 Paket		
		Kecamatan Tanete Riattang Barat				
	- Pengadaan Cermin Tikungan	Desa Mappesangka Kecamatan Ponre	- Cermin Tikungan	2 Buah		
		Desa Palongki Kecamatan Tellu		1 Unit		
		Siattinge				
	- Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Desa Lampoko Kecamatan Barebbo	-Rambu-rambu Lalu Lintas	10 Unit		
		Desa Corawali Kecamatan Barebbo		10 Unit		
		Desa Maduri Kecamatan Palakka		5 Unit		
		Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana		5 Unit		
		Desa Tocinnong Kecamatan Amali		12 Unit		
		Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali		10 Unit		



3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Pembangunan Nasional di bidang perhubungan, pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengamanan melalui penyusunan standar pelayanan minimal guna untuk menjamin obsesi untuk pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional. Standar pelayanan minimal bidang perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

A. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan;
2. Mengembangkan insfratraktur dan aksebilitas jalan khususnya pada keselamatan dan kelengkapan jalan;
3. Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

B. Sasaran

Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Perhubungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan;
2. Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur dasar dan aksebilitas jalan;
3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah tentang Retribusi, ketertiban Kendaraan Bermotor di kawasan wilayah Kabupaten Bone. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1). Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- 2). Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
- 3). Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
- 4). Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah;

B. Administrasi Keuangan

- 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2). Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

C. Administrasi Umum

- 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 3). Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 4). Penyediaan Cetak dan Penggandaan;
- 5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 6). Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 7). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah;
- 8). Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;

- 9). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 10.) Pengadaan Mebeleur;
 - 11). Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
 - 12). Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
 - 13). Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1). Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 - 2). Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - 3). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
- A. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota
- 1). Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota;
- B. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
- 1). Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota;
 - 2). Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan;
- C. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 1). Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
 - 2). Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- D. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 1). Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2). Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 3). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 4). Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor;
 - 5). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 6). Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- E. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
- 1). Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

F. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- 1). Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
- 2). Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- 3). Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kabupaten / Kota;
- 4). Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

G. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

- 1). Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota;



Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dirumuskan sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KAB. BONE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.15 01	PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.626.538.000			1.935.839.500
2.15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan realisasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran		100%	95.950.000	APBD	100%	111.263.000
2.15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 dokumen	12.000.000	APBD	2 dokumen	13.200.000
2.15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 dokumen	25.200.000	APBD	2 dokumen	27.740.000
2.15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 dokumen	6.820.000	APBD	2 dokumen	13.200.000
2.15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 bulan	12.000.000	APBD	12 bulan	13.200.000
2.15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	6 dokumen	39.930.000	APBD	6 dokumen	43.923.000

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan realisasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran		100%	59.600.000			100%	65.560.000
2.15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 bulan	APBD		1 dokumen
2.15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 dokumen	20.000.000	APBD		1 dokumen	22.000.000
2.15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4 dokumen	59.600.000	APBD		4 dokumen	43.560.000
2.15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah		100%	100.971.500			100%	100.971.500
2.15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN/Non ASN yang mendapat pakaian Olahraga sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	200 pasang	50.000.000	APBD		-	50.000.000
2.15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 orang	31.971.500	APBD		1 orang	31.971.500
2.15 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis / Non Formal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 orang	19.000.000	APBD		5 orang	19.000.000

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
2.15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran		100%	81.971.500	APBD		100%	370.000.000
2.15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 bulan	62.379.000	APBD		12 bulan	62.379.000
2.15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 bulan	52.940.000	APBD		12 bulan	52.940.000
2.15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan pengandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 Bulan	47.820.460	APBD		12 Bulan	47.820.460
2.15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	24 bulan	50.000.000	APBD		24 bulan	20.000.000
2.15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam luar daerah yang diikuti oleh aparat perangkat daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 kali	31.971.500	APBD		30 kali	350.000.000
2.15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	487.475.000	APBD		100%	487.475.000
2.15 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4 unit	430.000.000	APBD		4 unit	430.000.000
2.15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 unit	38.115.000	APBD		2 unit	38.115.000
2.15 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 unit	19.360.000	APBD		2 unit	19.360.000
2.15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	555.800.000			100%	555.800.000
2.15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, telepon dan website sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	24 bulan	20.000.000	APBD		24 bulan	20.000.000
2.15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	108 Orang	535.800.000	APBD		108 Orang	535.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	244.770.000			100%	244.770.000
2.15 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Kecamatan Tanete Riattang Barat	41 unit	200.000.000	APBD		45 unit	200.000.000
2.15 01	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	36.300.000	APBD		1 Kegiatan	36.300.000
2.15 01	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 bulan	8.470.000	APBD		12 bulan	8.470.000
2.15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase pemenuhan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</i>			2.761.569.200	APBD			2.951.569.200
2.15 02	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota		100%	10.000.000			100%	10.000.000
2.15 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 kebijakan	10.000.000	APBD		1 kebijakan	10.000.000
2.15 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		100%	960.000.000	APBD		100%	960.000.000
2.15 02	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah pembangunan halte	Kabupaten Bone	2 buah	560.000.000	APBD		2 buah	560.000.000
2.15 02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan	Kabupaten Bone	38 Triuk	400.000.000	APBD		38 Triuk	400.000.000
2.15 02	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100%	231.500.000			100%	231.500.000
2.15 02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah masyarakat dan pengendara yang terlayani	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12 bulan	181.500.000	APBD		12 bulan	181.500.000
2.15 02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 paket	50.000.000	APBD		-	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikator
2.15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor		100%	237.159.200			100%	237.159.200
2.15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen registrasi kendaraan wajib uji	Kecamatan Palakka	1 dokumen	38.720.000	APBD		1 dokumen	38.720.000
2.15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Kecamatan Palakka	1 dokumen	41.914.000	APBD		1 dokumen	41.914.000
2.15 02 2.05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor	Kecamatan Palakka	1 dokumen	42.217.000	APBD		1 dokumen	42.217.000
2.15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Palakka	1 unit	73.503.200	APBD		1 unit	73.503.200
2.15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Palakka	1 kegiatan	40.805.000	APBD		1 kegiatan	40.805.000
2.15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		100%	1.096.500.000			100%	1.096.500.000
2.15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah reviter, alat komunikasi Handy Talky, zona selamat sekolah, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail, cermin tikungan	Kabupaten Bone	1 paket	1.096.500.000	APBD		1 paket	1.096.500.000
2.15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan L.L.AJ di Jalan	Cakupan Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan L.L.AJ di Jalan		100%	Rp 80.000.000			100%	Rp 270.000.000
2.15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor L.L.AJ	Jumlah auditor dan inspektor L.L.AJ yang terlatih	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp 20.000.000			2 Kegiatan	Rp 50.000.000
2.15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah keselamatan angkutan mobil penumpang / barang yang meningkat	Kabupaten Bone	2 Kali	Rp 20.000.000			8 Kali	Rp 80.000.000
2.15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kabupaten / Kota	Jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang memenuhi syarat pemenuhan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	Kabupaten Bone	2 Kali	Rp 20.000.000			6 Kali	Rp 60.000.000
2.15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah sistem keselamatan perusahaan angkutan umum yang terbentuk	Kabupaten Bone	1 Dokumen	Rp 20.000.000			1 Dokumen	Rp 80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.15 02 2.12	Pencapaian Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota		100%	146.410.000				100%	146.410.000
2.15 02 2.12 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan uji coba	Kabupaten Bone	2 kali	146.410.000	APBD			2 kali	146.410.000
JUMLAH					4.388.107.200					4.887.408.700



Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan dibidang Perhubungan sebagai wujud nyata dan tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selama kurun waktu Satu tahun, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bone, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021. Adapun fungsi dari Renja tahun 2021 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2021, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone kami susun secara objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Watampone, Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**

Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19640830 199205 1 001